


edisi revisi

Inu Kencana Syafiie

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

AAN
Y
yah Yogyakarta

 **Penerbit
RINEKA CIPTA**

Sanksi Pelanggaran

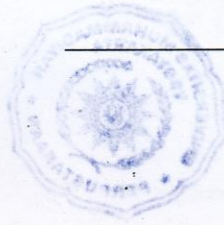
**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta
Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987**

Pasal 44

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
(Edisi Revisi)**

Oleh : *Inu Kencana Syafie*
Dosen IIP, STPDN, Universitas Langlangbuana,
STIAN, MAPD



Cetakan Kedua, Maret 2010

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 36-A, Blok-B No. 5 Jakarta 10210
Telp. (021) 5736640, 5737645. Fax. (021) 5711985
Anggota IKAPI No. 112/DKI/90

Dicetak oleh *PT Asdi Mahasatya*, Jakarta

RC. No : 1367/H/2006
ISBN : 979-618-738-4

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		v
BAB I	PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR	1
	A. Pengertian Pengertian	1
	B. Pengertian Pengetahuan	2
	C. Pengertian Ilmu	2
	D. Pengertian Seni	6
	E. Pengertian Sistem	8
	F. Pengertian Administrasi	13
	G. Pengertian Publik	17
	H. Pengertian Negara	20
BAB II	BATASAN ADMINISTRASI PUBLIK	23
	A. Pendefinisian Administrasi Publik	23
	B. Paradigma Administrasi Publik	26
	C. Ruang Lingkup Administrasi Publik	27
BAB III	POSISI ADMINISTRASI PUBLIK	31
	A. Dalam Ilmu-ilmu Kenegaraan	32
	B. Dalam Ilmu-ilmu Non-Kenegaraan	39
BAB IV	UNSUR ADMINISTRASI PUBLIK	48
	A. Manajemen Publik	48
	B. Organisasi Publik	51
	C. Komunikasi Pemerintahan	58
	D. Informasi Pemerintahan	61
<i>Daftar Isi</i>		vii

	E. Kepegawaian	64
	F. Perbekalan	66
	G. Humas Pemerintahan	71
BAB V	FUNGSI MANAJEMEN PUBLIK	74
	A. <i>Public Planning</i>	74
	B. <i>Public Actuating</i>	78
	C. <i>Public Controlling</i>	81
	D. <i>Public Coordinating</i>	85
	E. <i>Public Leading</i>	87
	F. <i>Public Motivating</i>	90
BAB VI	KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK	93
	A. Isu Pembangunan	93
	B. Birokrasi Publik	102
	C. Kebijakan Publik	104
	D. Konsep Pelayanan Publik	115
BAB VII	PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK	118
	A. Sistem Administrasi Publik di Negara-negara Maju	118
	B. Sistem Administrasi Publik di Negara-negara Berkembang	128
BAB VIII	SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA	136
	A. Tinjauan Budaya	136
	1. Budaya Jawa dan Administrasi Publik	137
	2. Budaya Minangkabau dan Administrasi Publik	138
	3. Budaya Sunda dan Administrasi Publik	139
	4. Budaya Bugis Makassar dan Administrasi Publik	140
	5. Budaya Manado dan Administrasi Publik	141
	6. Budaya Aceh dan Administrasi Publik	142
	7. Budaya Papua dan Administrasi Publik	142
	8. Budaya Batak dan Administrasi Publik	143
	9. Budaya Bali dan Administrasi Publik	144
	B. Tinjauan Sejarah	144
	1. Periode Sebelum Kemerdekaan	144
	2. Periode Sesudah Kemerdekaan	148

3.	Orde Lama	158
4.	Orde Baru	160
C.	Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara	162
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	162
2.	Presiden dan Wakil Presiden	167
3.	Dewan Perwakilan Rakyat	173
4.	Mahkamah Agung	176
5.	Dewan Pertimbangan Agung	178
6.	Badan Pertimbangan Agung	180
7.	Mahkamah Konstitusi	180
8.	Organisasi Departemen	186
9.	Organisasi Non-Departemen	193
D.	Administrasi Pemerintahan Daerah	199
E.	Administrasi Pemerintahan Desa	201
BAB IX	FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK	209
A.	Etika Administrasi Publik	209
B.	Logika Administrasi Publik	212
C.	Estetika Administrasi Publik	223
D.	Titik Temu Etika Logika, dan Estetika Administrasi Publik	229
E.	Mahzab Filsafat	231
F.	Pandangan Beberapa Tokoh	240
G.	<i>Bold State</i> dan <i>No State</i>	245
BAB X	ADMINISTRASI PUBLIK DAN AGAMA	248
A.	Islam	248
B.	Kristen	253
C.	Budha	255
D.	Hindu	256
E.	Yahudi	258
BAB XI	PENUTUP	261
A.	Kesimpulan Umum	261
B.	Saran-saran	262
Daftar Pustaka	263

Administrasi Publik merupakan pelayanan yang semula diadakan untuk melayani masyarakat umum. Tetapi kemudian berbalik menjadi pelayanan terhadap negara, kendati negara sebenarnya diadakan untuk kepentingan orang banyak. Memang *publik* dapat diartikan sebagai *negara* di satu sisi kepentingan, tetapi di sisi lain harus diartikan sebagai *kepentingan masyarakat umum yang dilayani pemerintah*, sepanjang sesuai dengan kaidah moral dan agama.

Buku ini menyuguhkan pengkajian administrasi publik yang komprehensif integral dengan mengikutsertakan perbandingan administrasi di berbagai negara maju dan berkembang, serta etika administrasi publik yang berangkat dari nilai-nilai luhur yang sifatnya transendental. Sajian spesifik dalam buku ini adalah keseimbangan antara pelayanan dan kekuasaan, sebagaimana keseimbangan desentralisasi dan sentralisasi, serta keseimbangan kasih dan hukum.

Dalam cetakan kedua yang sekaligus merupakan Edisi Revisi I ini, di samping diadakan perbaikan-perbaikan kesalahan cetak, juga dilakukan perelevansian uraian dengan situasi politik dan pemerintahan di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian ada yang dibuang dan diganti, ada pula yang diadakan perombakan total seperti pada Bab IX (semula *Etika Administrasi Publik* menjadi *Filsafat Administrasi Publik*).

PER
P
Universitas Mut



ISBN : 979-518-738-4

Dicetak oleh PT ASDI MAHASATYA